

Sidoarjo District Government Performance Reporting System [Sistem Informasi Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo]

Purwantoro¹⁾, Sumarno ^{*2}

¹⁾Program Studi Informatika, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Informatika, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi:sumarno@umsida.ac.id

Abstract. *The Performance Reporting System is a web-based application designed to realize accountability and transparency in government administration, as well as ensuring that every use of public resources can be accounted for effectively and efficiently and integrating planning, budgeting and realization data. This Performance Reporting System uses the waterfall method. This system was created using the Python programming language with the Streamlit framework and Postgree database. With time efficiency, data accuracy and data security, the system becomes an effective and efficient digital solution in supporting the creation of annual performance reports in the Sidoarjo Regency Government area. The evaluation of this system uses the Blackbox Testing method, which shows that all features in the system are running well. This Performance Reporting System is able to be an effective and efficient digital solution in supporting the creation of reports quickly and accurately in supporting the monitoring and evaluation of the performance of Regional Apparatus in the Sidoarjo Regency Government.*

Keywords – Kinerja; Waterfall Method; Website; Python, Streamlit, Postgree; Blackbox Testing; UAT Testing

Abstrak. *Sistem Pelaporan Kinerja merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, serta memastikan bahwa setiap penggunaan sumber daya publik dapat dipertanggungjawabkan secara efektif dan efisien serta mengintegrasikan data perencanaan, penganggaran dan realisasi. Sistem Pelaporan Kinerja ini menggunakan metode waterfall. Sistem ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework Streamlit dan basis data Postgree. Dengan efisiensi waktu, keakuratan data dan keamanan data sistem menjadi solusi digital yang efektif dan efisien dalam mendukung pembuatan laporan kinerja setiap tahun di wilayah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Evaluasi sistem ini menggunakan metode Blackbox Testing, yang menunjukkan semua fitur pada sistem berjalan dengan baik. Sistem Pelaporan Kinerja ini mampu menjadi solusi digital yang efektif dan efisien dalam mendukung pembuatan laporan secara cepat dan akurat dalam mendukung monitoring dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.*

Kata Kunci - Kinerja; ; Metode Waterfall; Website; Python, Streamlit, Postgree; pengujian Blackbox; pengujian UAT

I. PENDAHULUAN

Pelaporan kinerja merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya menciptakan akuntabilitas publik. Melalui pelaporan ini, pemerintah dapat menunjukkan capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan secara cepat dan akurat [1]. Pelaporan kinerja dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran dan realisasi. Kenyataannya masih sering dijumpai permasalahan terkait belum terintegrasinya data antara dokumen perencanaan dengan data realisasi pelaksanaan program dan kegiatan [2].

Pelaporan kinerja pemerintah daerah bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, serta memastikan bahwa setiap penggunaan sumber daya publik dapat dipertanggungjawabkan secara efektif dan efisien [3]. Melalui laporan kinerja, instansi pemerintah dapat menilai sejauh mana tujuan dan sasaran strategis telah tercapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Selain itu, pelaporan kinerja berfungsi sebagai alat evaluasi dan pengambilan keputusan manajerial, mendorong perbaikan berkelanjutan, serta menjadi dasar dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) [4]. Dengan demikian, pelaporan kinerja memberikan manfaat penting dalam meningkatkan efektivitas pembangunan, efisiensi penggunaan anggaran, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan pengembangan sistem informasi berbasis web untuk pembuatan pelaporan kinerja. Penelitian pertama yang berjudul “Faktor penghambat penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo” oleh Nisak Hargani, Tri Murwaningsih, Nur Rahmi Akbarini (2023) [5]. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAKIP masih menghadapi hambatan, seperti kurangnya pemahaman pegawai, rendahnya komitmen pimpinan, dan tidak terintegrasinya sistem informasi kinerja. Solusi yang diusulkan mencakup pelatihan SDM, coaching clinic, dan penguatan budaya kinerja. Penelitian kedua dengan judul “Analisis Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang)” oleh

Andre Juanda Parulian Limbong, Rusdi Akbar, M.Sc., Ph.D., Ak., CA.(2024)[6]. Studi ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi SAKIP menghadapi hambatan pada aspek evaluasi dan indikator kinerja yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip SMART. Rekomendasi utama dalam penelitian ini adalah penerapan pendekatan *institutional entrepreneurship* untuk mendorong perubahan budaya organisasi yang lebih adaptif dan inovatif. Penelitian ketiga dengan judul “Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Pemerintah Kabupaten Bombana” oleh Erlin Hasman, Nofal Supriaddin, Asraf Asraf (2023) [7]. Penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan perencanaan kinerja telah dilakukan, namun pelaksanaannya belum optimal. Kendala yang dihadapi antara lain kurangnya pemahaman terhadap indikator kinerja, evaluasi antar-OPD yang belum menyeluruh, serta keterbatasan infrastruktur IT dan SDM.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Sistem Pelaporan Kinerja yang berbasis web akan sangat membantu menyajikan pelaporan tahunan yang berupa realisasi anggaran dan kinerja secara cepat dan akurat, tanpa harus terhambat karena kurangnya SDM atau dikarenakan perpindahan personil yang menangani pelaporan.

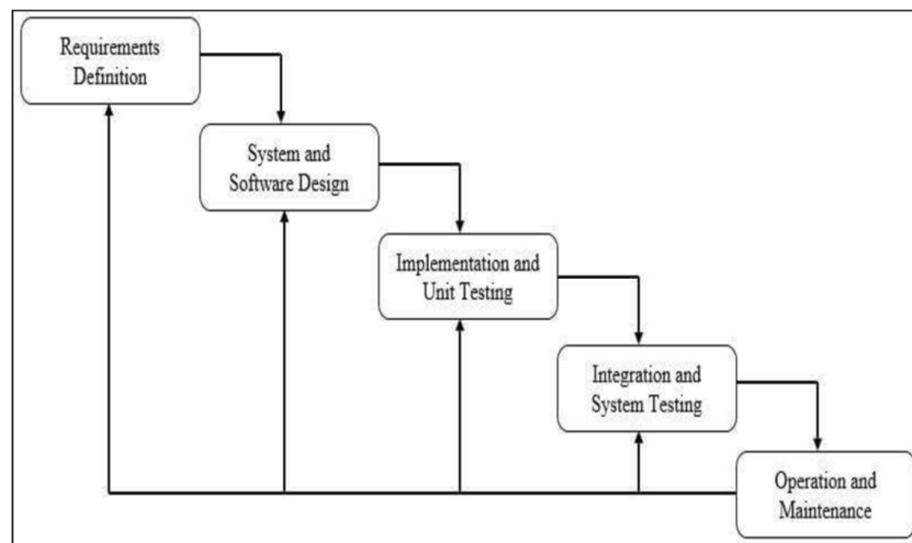
II. METODE

A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan teknik yang diaplikasikan dalam pengumpulan data dan analisis data. Agar data lebih komprehensif, maka penelitian ini menggunakan penelitian dengan mengintegrasikan beberapa aplikasi ke dalam Sistem Pelaporan Kinerja.

B. Metode Pengembangan Sistem

Model Waterfall, yang juga dikenal sebagai siklus hidup klasik atau model linier sekuensial (sequential linear), menawarkan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang sistematis dan berurutan [8]. Dalam model ini, setiap tahapan proses berlangsung secara bertahap, dengan alur yang mengalir ke bawah secara terstruktur, menyerupai aliran air terjun (Pressman, 2015) seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Metode Waterfall

Model ini terdiri dari lima tahap utama yang dilakukan secara berurutan yaitu:

1. Requirement (Kebutuhan)

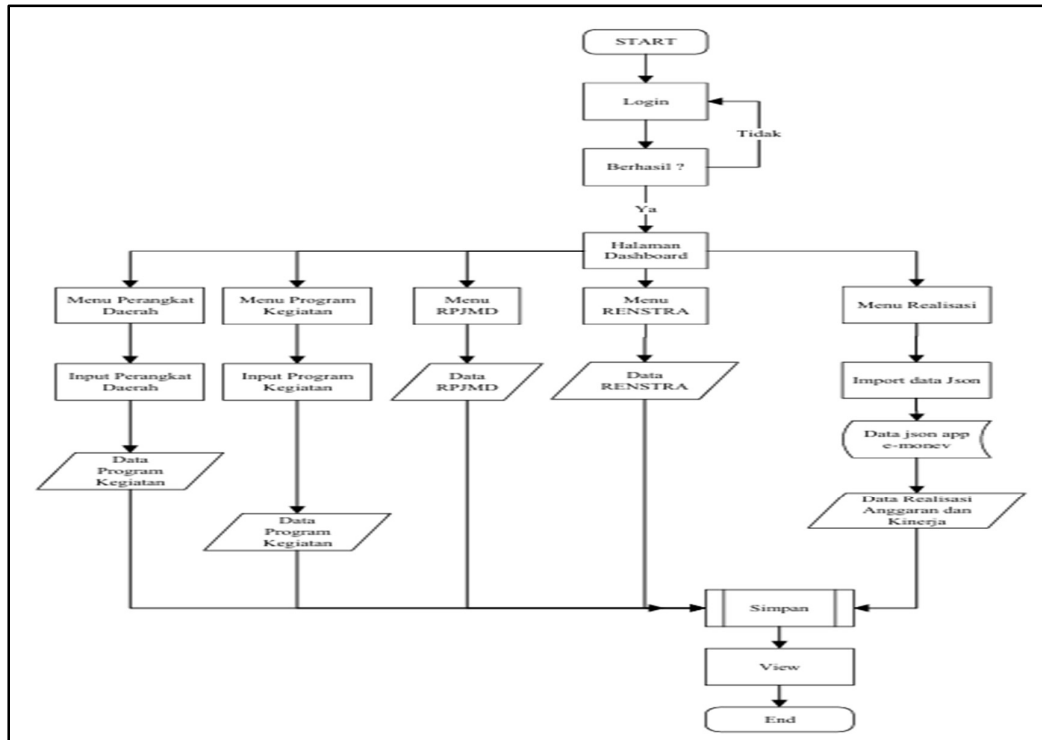
Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan kebutuhan dari pengguna atau stakeholder. Semua informasi yang dibutuhkan untuk sistem dicatat secara lengkap dan jelas, baik kebutuhan fungsional (apa yang harus dilakukan sistem) maupun non-fungsional (seperti keamanan, performa, dll). Hasil dari tahap ini adalah dokumen spesifikasi kebutuhan sistem [8].

2. Design (Perancangan)

Tahap ini bertujuan untuk mengubah kebutuhan yang telah dikumpulkan menjadi rancangan sistem yang dapat diimplementasikan. Proses ini meliputi perancangan arsitektur sistem, struktur database, tampilan antarmuka, dan desain logika proses [9]. Adapun rancangan sistemnya yaitu :

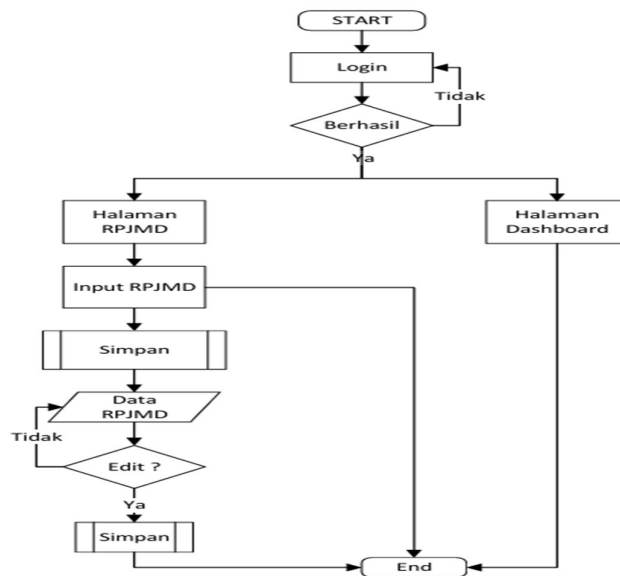
a. Flowchart

Dalam penelitian ini adapun flowchart jalannya aplikasi yang akan dibuat sebagai berikut :



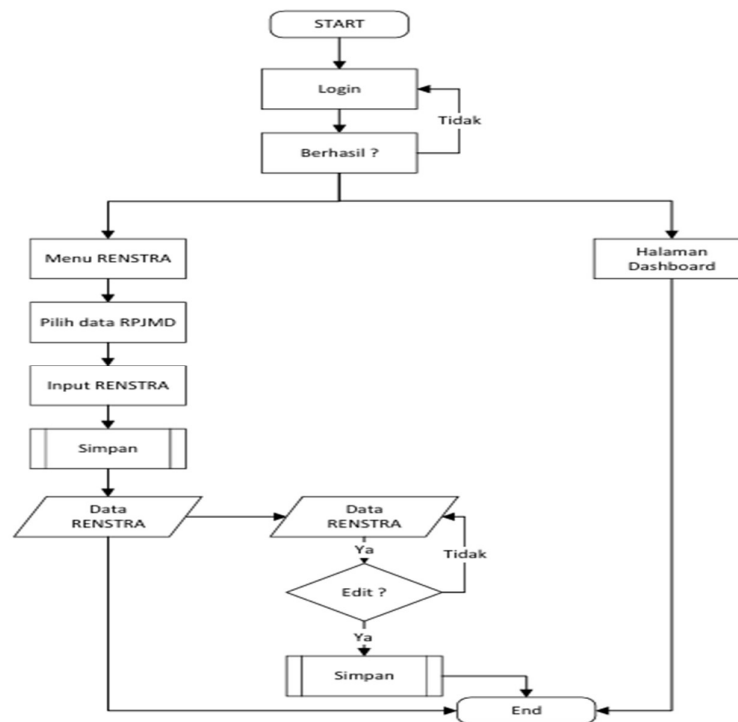
Gambar 2. Flowchart Admin

Pada gambar 2 flowchart diatas dijelaskan bahwa admin harus melakukan autentikasi terlebih dahulu. Setelah berhasil login admin diarahkan ke menu dashboard. Admin dapat mengelola data master program, kegiatan, sub kegiatan dan master Perangkat Daerah. Selanjutnya admin mengelola data dari aplikasi e-monev berupa json yang nantinya akan digunakan sebagai informasi terhadap capaian realisasi anggaran.



Gambar 3. Flowchart Bappeda

Pada flowchart Bappeda merupakan alur aktifitas Bappeda dalam menginput RPJMD dengan menginput visi, misi, tujuan, sasaran dan program. Untuk data program merupakan data yang diambil dari master program.

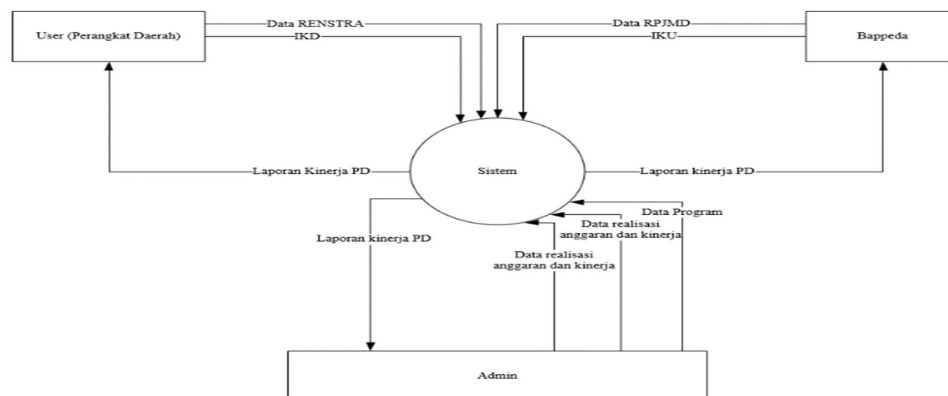


Gambar 4. Flowchart user (Perangkat Daerah)

Flowchart user (Perangkat Daerah) mempunyai aktifitas menginput RENSTRA Perangkat Daerah. Dalam menginput RENSTRA harus memilih data RPJMD yang di input oleh Bappeda.

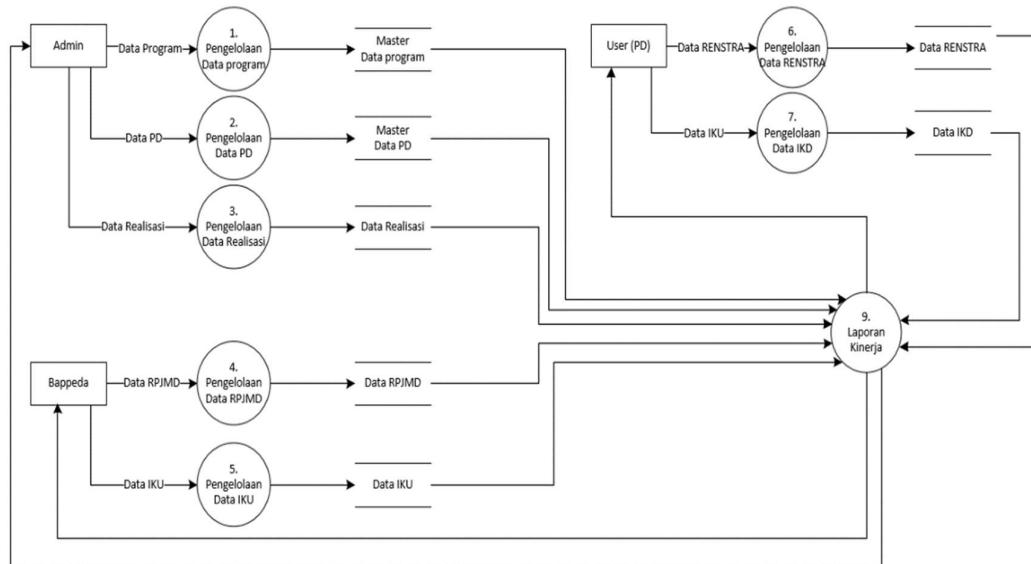
b. Data Flow Diagram (DFD)

DFD merupakan sebuah model logika data atau proses yang dibuat untuk menggambarkan sebuah data darimana berasal dan kemana tujuan data tersebut keluar dari sistem, dimana data tersebut tersimpan, bagaimana proses data tersebut dihasilkan, hubungan antara data yang tersimpan, dan proses yang diberlakukan pada data tersebut [10]. Adapun penjelasan tentang jalannya suatu proses dari sistem pelaporan kinerja yang dimana hal tersebut digambarkan pada notasi-notasi dengan bentuk diagram yang dinamakan Data Flow Diagram atau DFD. Berikut DFD dari sistem pelaporan kinerja.



Gambar 5. Data Flow Diagram Level 0

Pada gambar 5 menjelaskan tentang Data flow diagram level 0 dari sistem pelaporan kinerja. Admin mengelola data yang terdiri dari data program, perangkat daerah dan data realisasi anggaran. Bappeda mengelola data RPJMD. Data RPJMD mempunyai relasi dengan data program. Sedangkan user (perangkat daerah) mengelola data RENSTRA. Data RENSTRA mempunyai relasi dengan data RPJMD.



Gambar 6. Data Flow Diagram Level 1

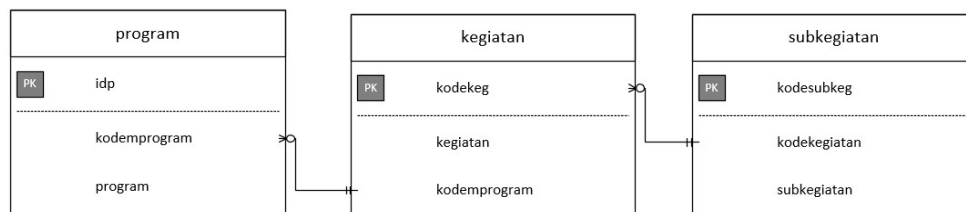
Sedangkan pada gambar 6 menjelaskan tentang data flow diagram level 1. Berdasarkan gambar 6 setiap entitas mempunyai tanggung jawab terhadap data yang di input. Admin mengelola data program, perangkat daerah dan realisasi anggaran. Bappeda mengelola data RPJMD. User (perangkat daerah) mengelola RENSTRA. Dari hasil pengolahan data tersebut akan menjadi pelaporan kinerja yang bisa diakses oleh admin, Bappeda dan user (perangkat daerah) dan dapat disajikan kepada evaluator baik ditingkat Propinsi atau Kementerian.

c. Relasi Tabel Database

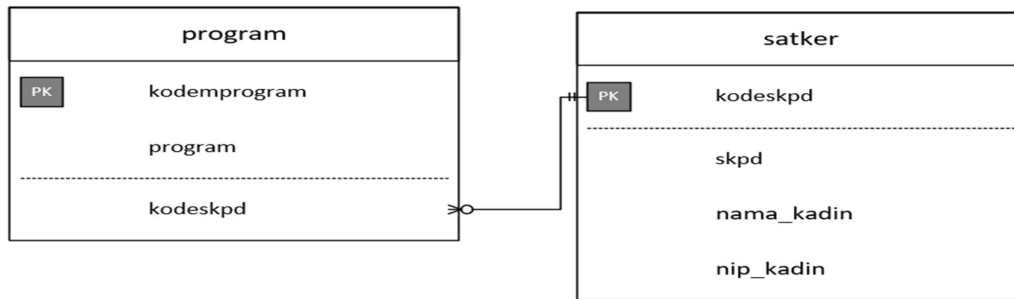
Relasi tabel database merupakan hubungan antara tabel database dengan tabel database lainnya. Pada relasi tabel database terdapat 3 (tiga) macam relasi antara lain :

1. One to many atau satu ke banyak merupakan relasi yang menjelaskan bahwa satu field dari tabel database memiliki banyak data pada tabel database lainnya [11].
2. Many to many atau banyak ke banyak merupakan relasi yang menjelaskan bahwa dari sekian banyak field pada database memiliki banyak data dengan tabel yang lain [12].
3. One to one atau satu ke satu merupakan relasi yang menjelaskan bahwa satu field dalam tabel memiliki 1 data field pada tabel database lainnya [13].

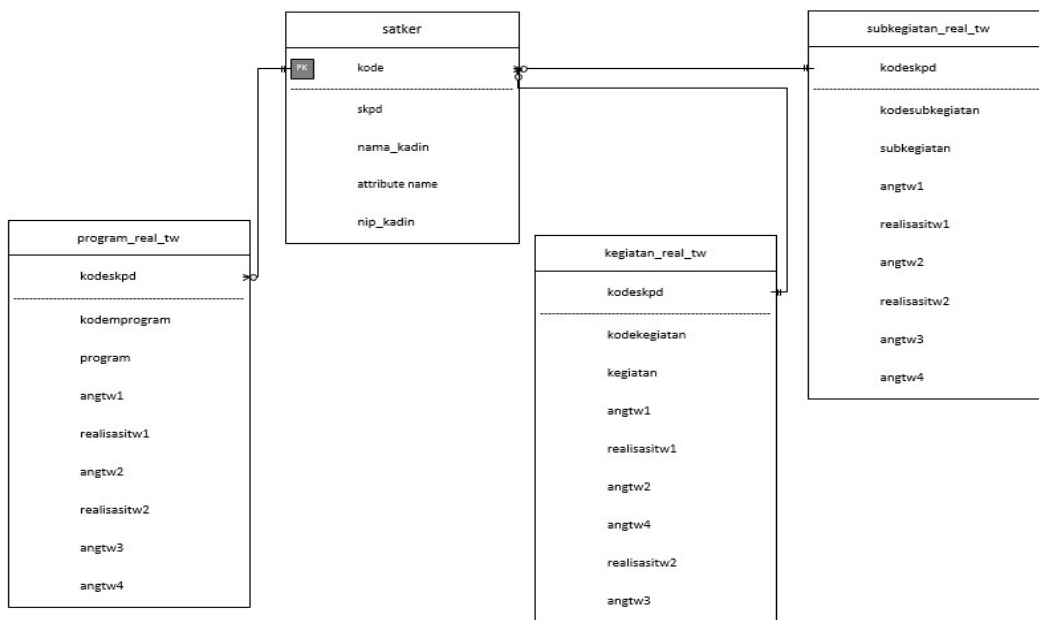
Adapun gambaran relasi antar tabel database yang digunakan pada pengembangan system pelaporan kinerja sebagai berikut.



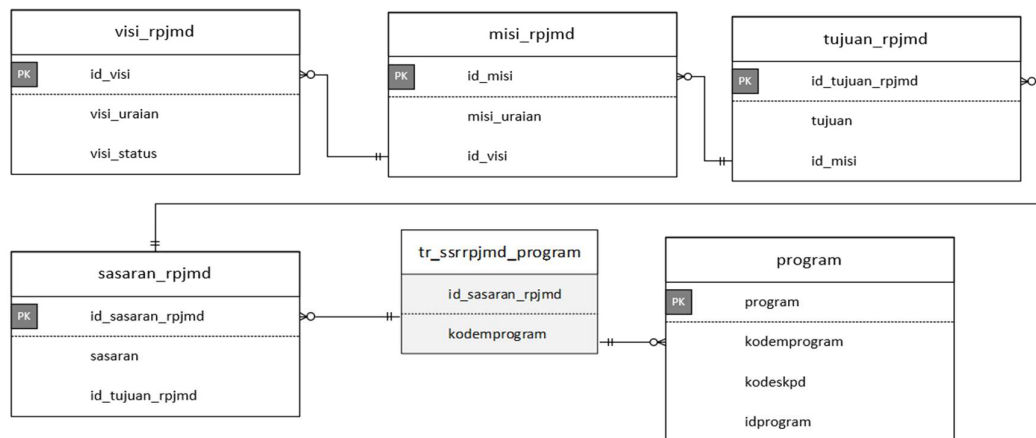
Gambar 7. Relasi Tabel Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

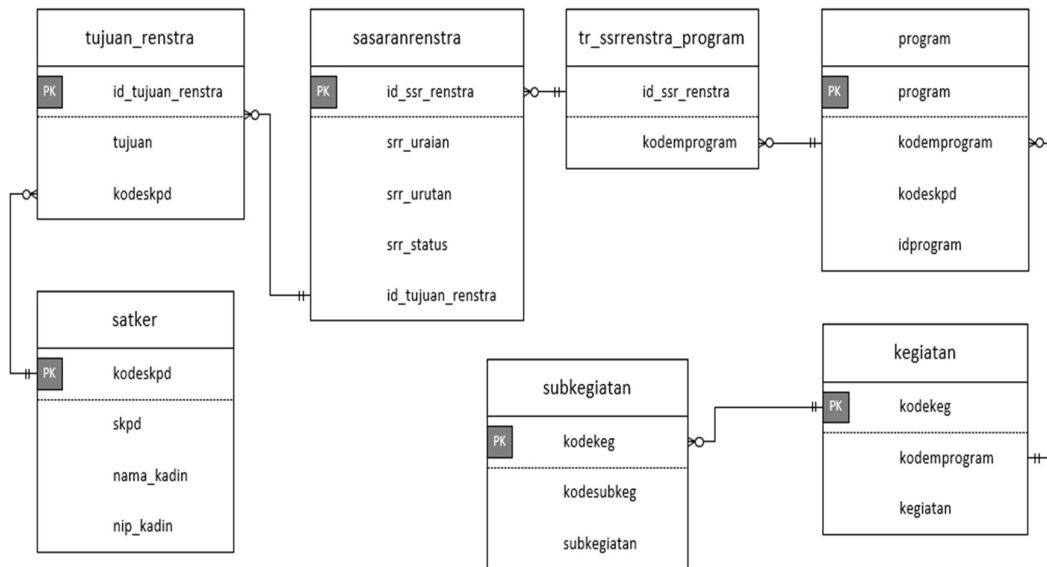


Gambar 8. Relasi Tabel data Perangkat Daerah



Gambar 9. Relasi table data realisasi anggaran



Gambar 10. Relasi table data RPJMD**Gambar 11. Relasi table data RENSTRA**

3. Implementation (Implementasi)

Setelah desain selesai, pengembang mulai menulis kode program berdasarkan perancangan tersebut. Tahap ini menghasilkan perangkat lunak yang berfungsi, di mana setiap modul diuji secara unit (unit testing) untuk memastikan bahwa setiap bagian dari sistem berjalan sesuai fungsi yang diinginkan [11].

4. Verification (Verifikasi)

Tahap ini meliputi pengujian sistem secara keseluruhan, mulai dari integrasi antar modul, uji fungsionalitas, hingga validasi bahwa sistem telah memenuhi kebutuhan pengguna seperti yang didefinisikan pada tahap awal [14]. Metode yang umum digunakan dalam tahap ini adalah pengujian sistem (system testing) dan pengujian penerimaan pengguna (user acceptance testing) [15].

5. Maintenance (Pemeliharaan)

Setelah sistem digunakan oleh pengguna, kemungkinan akan ditemukan bug atau kebutuhan akan pengembangan tambahan. Tahap ini mencakup pemeliharaan, perbaikan kesalahan, peningkatan performa, dan penyesuaian terhadap kebutuhan baru. Sistem yang baik harus mudah dipelihara dan dikembangkan lebih lanjut [12].

C. Analis Kebutuhan Sistem

1) Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional adalah fitur atau fungsi utama yang harus dimiliki oleh sistem agar dapat menjalankan tugas sesuai tujuan, yaitu sebagai berikut :

- Login merupakan langkah awal untuk masuk kedalam sistem (admin, Bappeda dan Perangkat Daerah) dan mengelola berbagai sistem data yang meliputi data user, RPJMD, RENSTRA dan data realisasi anggaran.
- Halaman Dashboard berisi tampilan halaman default yang mana menampilkan realisasi anggaran program per triwulan

2) Kebutuhan Non Fungsional

Kebutuhan non-fungsional adalah persyaratan kualitas sistem, bukan fitur langsung, tetapi sangat penting untuk performa dan keandalan. Berikut kebutuhan non fungsional dari sistem informasi ini:

- Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware)

1. Laptop hp (RAM 4GB)
2. SSD 300 GB
3. Koneksi internet
- b. Kebutuhan Perangkat Lunak (Software) yang membantu dalam pembuatan sistem ini yaitu :
 1. Sistem operasi windows 10
 2. Text Editor (Visual Studio Code)
 3. Python adalah bahasa pemrograman server-side yang dirancang untuk pengembangan web dinamis
 4. Postgree adalah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang bersifat open-source dan sangat populer digunakan untuk aplikasi berbasis web [18]

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Requirement (Kebutuhan)

Pada tahap ini, dilakukan identifikasi dan pengumpulan kebutuhan sistem dari pengguna melalui rapat koordinasi, observasi, dan studi dokumen. Keluaran dari tahap ini berupa Dokumen kebutuhan fungsional (apa saja fitur sistem) dan non-fungsional (seperti keamanan dan kecepatan) dan daftar pengguna sistem dan hak akses [17].

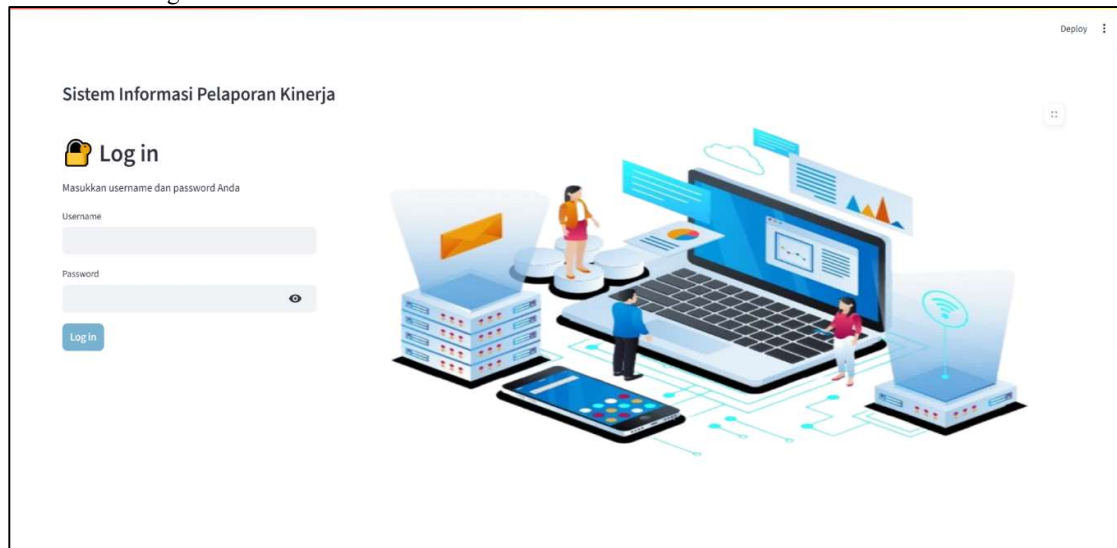
B. Design (Perancangan)

Hasil analisis kebutuhan digunakan untuk merancang struktur sistem, arsitektur, aliran data, dan basis data. Dokumen perancangan mencakup Data Flow Diagram (DFD) untuk menggambarkan alur informasi, Entity Relationship Diagram (ERD) untuk perancangan basis data dan Desain antarmuka pengguna (mockup) sistem pelaporan kinerja [18].

C. Implementation (Implementasi)

Sistem diuji oleh pengguna untuk menilai fungsionalitas dan kenyamanan. Tujuan dari pengujian adalah memastikan bahwa sistem bebas dari kesalahan (bug), sesuai dengan kebutuhan, dan mudah digunakan [10]. Aplikasi ini memiliki tampilan sebagai berikut :

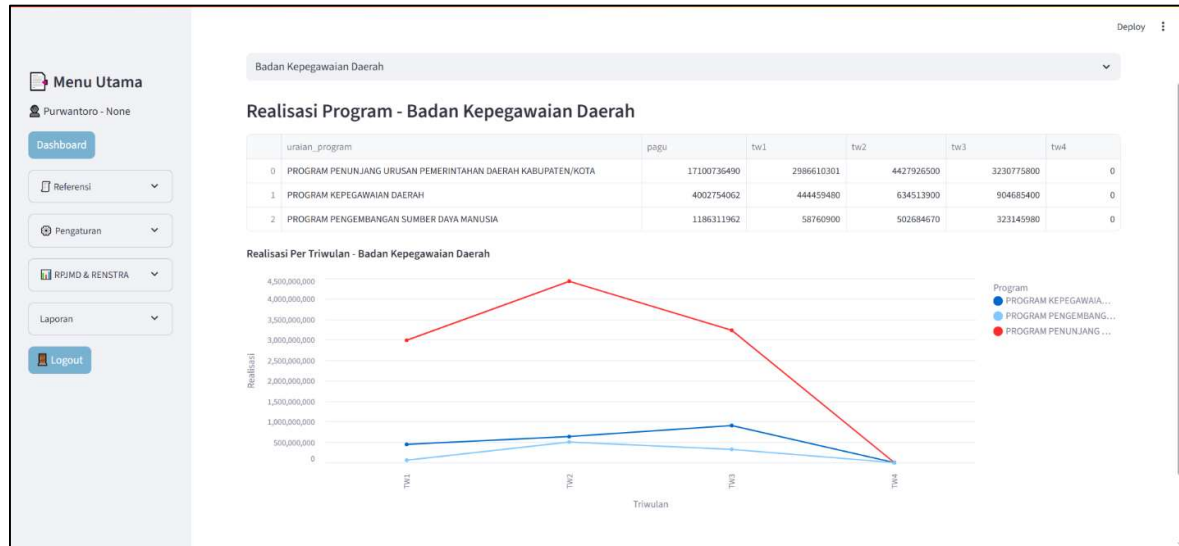
1. Halaman Login



Gambar 12. Halaman Login

Pada gambar 7 merupakan halaman login berfungsi untuk mengetahui akses untuk masuk ke sistem dan mengetahui siapa yang masuk ke sistem. Terdapat tombol masuk yang berfungsi untuk login ke sistem, user harus memasukkan username dan password.

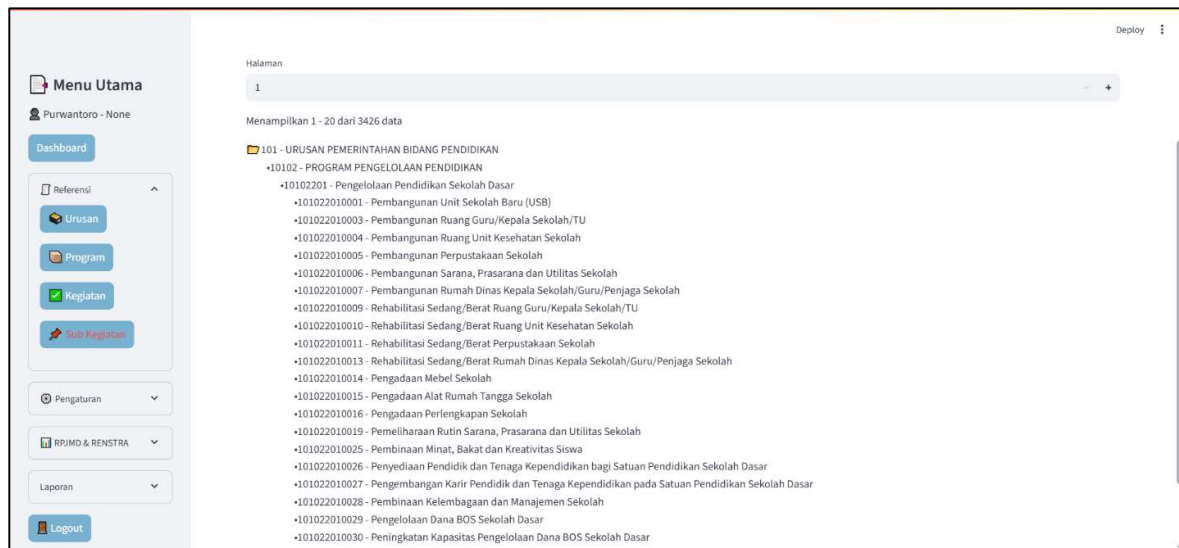
2. Halaman Dashboard



Gambar 13. Halaman Dashboard

Pada gambar 7 merupakan halaman dashboard yang menampilkan grafik garis yang menggambarkan realisasi anggaran pada masing-masing program di setiap Perangkat Daerah.

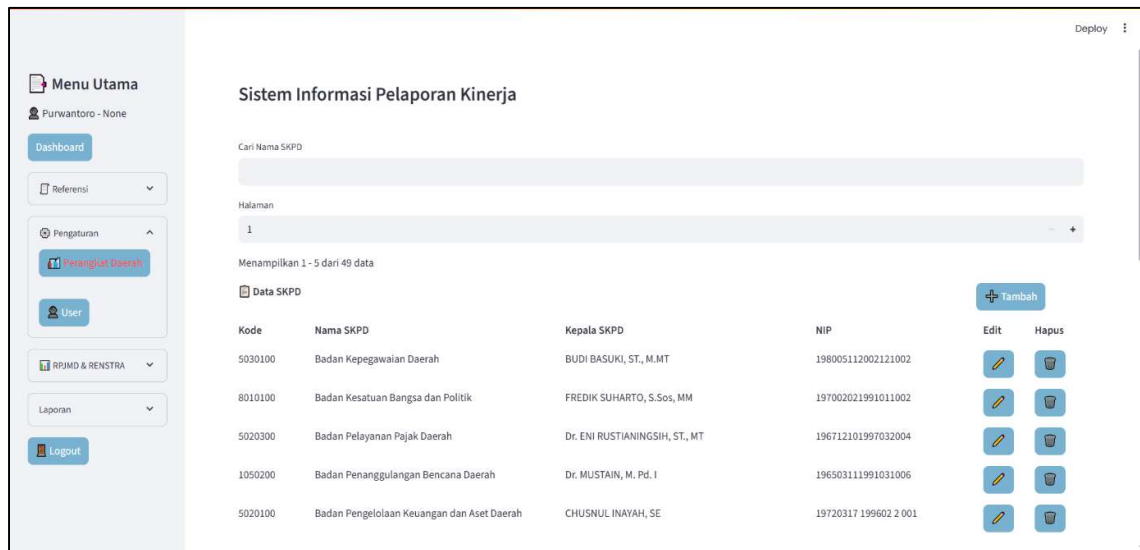
3. Halaman Referensi



Gambar 14. Halaman Referensi

Gambar 14 menampilkan halaman referensi yang dimulai dari urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan. Data referensi merupakan nomenklatur dari pemerintah pusat.

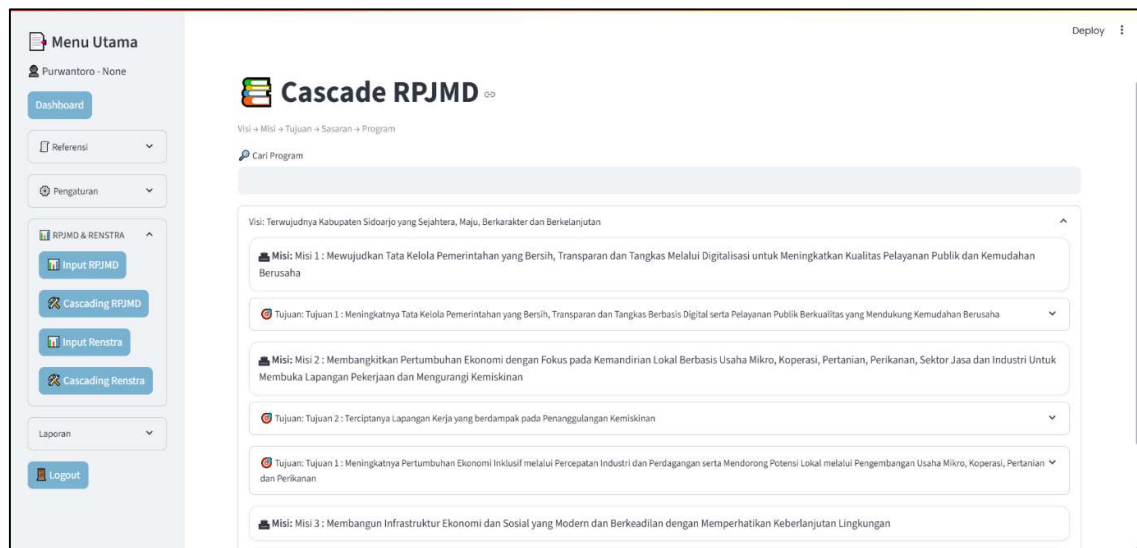
4. Halaman Pengaturan



Gambar 15. Halaman Pengaturan

Gambar 15 menampilkan halaman data perangkat daerah yang didalamnya terdapat nama Kepala Perangkat Daerah, NIP dan nama Perangkat daerah

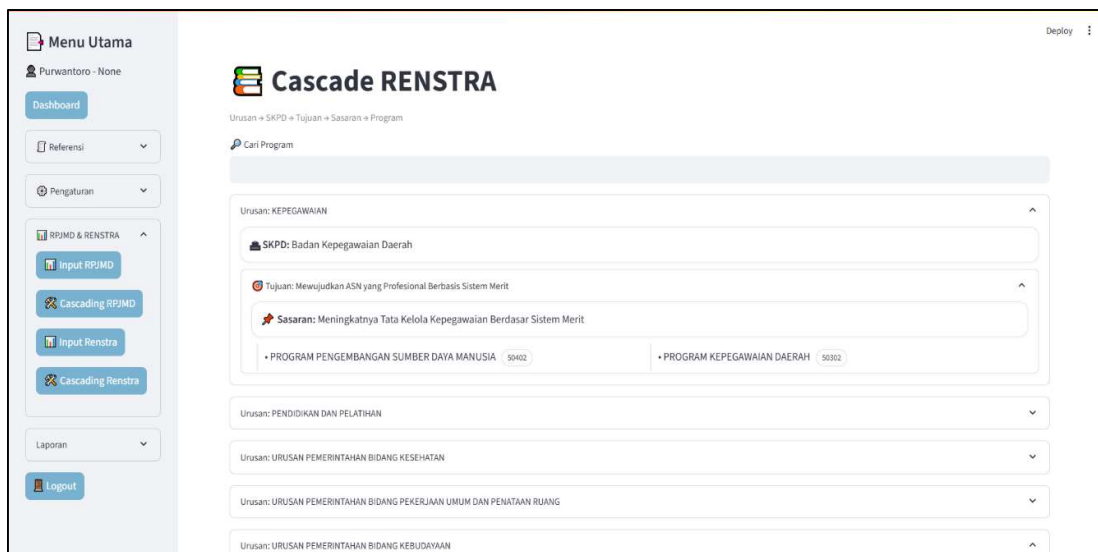
5. Halaman RPJMD



Gambar 16. Halaman RPJMD

Gambar 16 menampilkan cascading RPJMD yang terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran dan program.

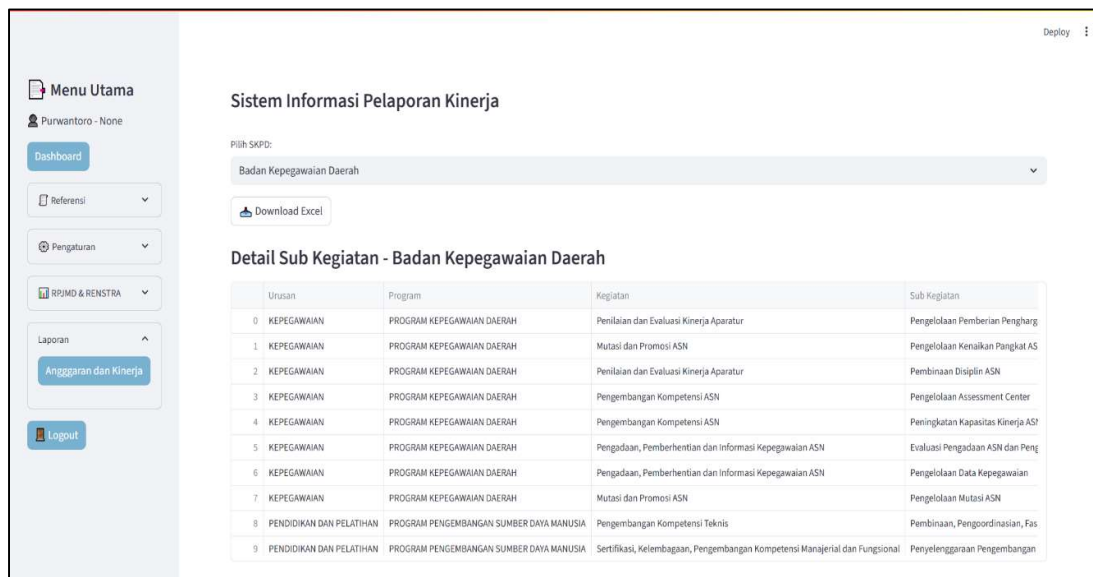
6. Halaman RENSTRA



Gambar 17. Halaman RENSTRA

Gambar 17 menampilkan data Perangkat Daerah dengan urusan yang merupakan wewenang dari Perangkat Daerah tersebut beserta tujuan, sasaran dan program.

7. Halaman Pelaporan



Gambar 18. Halaman pelaporan

Pada gambar 18 menampilkan laporan realisasi anggaran dan kinerja masing-masing Perangkat Daerah per sub k

D. Verification (Verifikasi dan Pengujian)

1. Pengujian Blackbox Testing

Setelah program dilakukan beberapa pengujian, selanjutnya prosedur pengujian sistem dilakukan. Pengujian black box merupakan sebuah prosedur untuk pengujian sistem informasi, karena hanya mengambil batas atas dan bawah dari data yang diantisipasi, pengujian black box mudah untuk diterapkan [9]. Pemeriksaan dilakukan selama menjalankan prosedur ini untuk mengidentifikasi kesalahan yang dapat terjadi.

Tabel 1. Pengujian Sistem

No.	Kelas Uji	Detail Pengujian	Hasil Pengujian
1	Login Aplikasi	Verifikasi data login dengan memasukkan username dan password	Berhasil
2	Menu Dashboard	Menampilkan grafik realisasi anggaran	Berhasil
3	Menu Referensi	Melihat referensi urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan	Berhasil
4	Menu Pengaturan	Menambah, mengedit dan menghapus data Perangkat Daerah dan user	Berhasil
5	RPJMD	Input RPJMD dan cascade hasil inputan	Berhasil
6	RENSTRA	Input RENSTRA dan cascade hasil inputan	Berhasil
7	Pelaporan	Menampilkan realisasi anggaran dan kinerja dan download laporan berbentuk excel	Berhasil

Berdasarkan hasil pengujian sistem yang tercantum pada Tabel 1, dapat disimpulkan bahwa seluruh komponen utama dalam aplikasi sistem pelaporan kinerja telah berjalan sesuai dengan fungsinya. Pengujian dilakukan terhadap tujuh fitur utama dan secara keseluruhan, seluruh fitur inti dalam sistem pelaporan kinerja telah diuji dan menunjukkan hasil “berhasil”. Hal ini membuktikan bahwa sistem telah siap digunakan dalam proses pelaporan secara efektif dan efisien.

2. Pengujian UAT (User Acceptance Testing)

Setelah pengujian sistem dilakukan selanjutnya pengujian UAT yang dilakukan melalui penilaian oleh pengguna untuk mengisi kuisioner tentang penilaian terhadap sistem pelaporan kinerja [15]. Pengujian ini dilakukan kepada 10 responden yang terdiri dari beberapa instansi. Setiap pertanyaan mempunyai 5 pilihan jawaban meliputi Sangat Setuju(SS), Setuju(S), Netral(N), Tidak Setuju(TS), Sangat Tidak Setuju(STS). Hasil Pengujian UAT dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Pengujian UAT

Pertanyaan	Responsi					Jumlah Responden	Persentasi
	SS	S	N	TS	STS		
Sistem ini memiliki tampilan yang menarik dan mudah dipahami	8	2				10	96 %
Sistem ini menggunakan navigasi antar menu yang mudah dilakukan	7	3				10	94 %
Semua menu di sistem ini berfungsi dengan baik	10					10	100 %
Instruksi penggunaan sistem jelas dan mudah diikuti	5	5				10	90 %

Proses input data berjalan lancar tanpa hambatan	10	10	80 %
Fitur pencarian data berjalan dengan baik	10	10	80 %
Fitur cetak laporan	10	10	80 %
Nilai Rata-rata			88,57 %

Berdasarkan hasil kuesioner dari 10 responden, mayoritas pengguna memberikan penilaian positif terhadap aplikasi yang digunakan. Secara keseluruhan, aplikasi ini memperoleh rata-rata tingkat kepuasan sebesar 88,57%, yang menunjukkan bahwa aplikasi dinilai sangat baik oleh para pengguna.

D. Maintenance (Pemeliharaan)

Setelah sistem diimplementasikan, dilakukan pemeliharaan secara berkala untuk memastikan sistem tetap berjalan optimal [12]. Beberapa saran dari pengguna, seperti penambahan menu untuk menu pengukuran kinerja, telah direncanakan untuk pengembangan tahap berikutnya. Sistem ini dirancang dengan struktur modular sehingga memudahkan proses modifikasi dan peningkatan fitur di masa mendatang.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian sistem dan respon pengguna terhadap aplikasi Sistem Pelaporan Kinerja, dapat disimpulkan bahwa sistem ini telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Seluruh fitur utama, seperti login aplikasi, menu dashboard, manajemen Perangkat Daerah dan user, hingga fitur pelaporan, telah berhasil diuji dan menunjukkan hasil “berhasil” tanpa kendala yang berarti.

Selain itu, berdasarkan kuesioner yang diisi oleh 10 responden, mayoritas pengguna memberikan respon positif terhadap tampilan, kemudahan navigasi, kejelasan instruksi, serta kelengkapan fitur dalam aplikasi. Dengan nilai rata-rata kepuasan pengguna sebesar 88,57%, aplikasi ini dinilai sangat baik dan layak digunakan dalam proses pelaporan kinerja di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Hal ini menunjukkan bahwa Sistem Pelaporan Kinerja efektif dan efisien dalam mendukung pelaksanaan pelaporan Kinerja berbasis teknologi informasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat-Nya, keluarga yang selalu memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penghargaan kepada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang telah menjadi sumber ilmu dalam pembuatan sistem pelaporan kinerja di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para dosen pembimbing yang telah memberikan bantuan dan bimbingannya dalam pengembangan penelitian ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Kontribusi mereka sangat berarti bagi penyelesaian penelitian ini dengan baik.

REFERENSI

- [1] N. Hawalya, H. Remmang, and F. Faridah, “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Maros,” *ACCESS: Journal of Accounting, Finance and Sharia Accounting*, vol. 3, no. 1, pp. 31–37, 2025, doi: 10.56326/access.v3i1.5532.
- [2] Y. D. Pramita, I. Nuraeni, and N. Afif, “Pengaruh kualitas laporan keuangan, pemanfaatan teknologi, pengendalian internal dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja,” *Borobudur Accounting Review*, vol. 3, no. 2, pp. 102–112, 2023, doi: 10.31603/bacr.11050.
- [3] L. Lubis, Ifni Suhaila, “Vol. 8 No. 1, 2024,” *Pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja umkm dimediasi kualitas laporan keuangan di kecamatan asahan*, vol. 8, no. 1, pp. 1456–1469, 2024.
- [4] P. Haryanto and R. T. Andayan, “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pelaporan, dan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,” *Seminar Nasional Perbanas Institute*, vol. 3, no. December 2023, pp. 70–84, 2023, [Online]. Available: <https://journal.perbanas.id/index.php/psn/issue/view/55>
- [5] N. Hargani, T. Murwaningsih, and N. R. Akbarini, “Faktor penghambat penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo,” *JIKAP (Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran)*, vol. 7, no. 4, p. 291, 2023, doi: 10.20961/jikap.v7i4.64455.
- [6] P. Daerah and K. Karawang, “SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG) Tesis Untuk Memenuhi Sebagai

- Persyaratan Mencapai Derajat Master of Accounting Program Studi Magister Akuntansi Oleh Andre Juanda Parulian Limbong,” 2024.
- [7] E. Hasman, N. Supriaddin, and A. Asraf, “Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Pemerintah Kabupaten Bombana,” *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)*, vol. 4, no. 2, p. 385, 2023, doi: 10.21927/ijma.2023.4(2).385-392.
 - [8] R. A. E. Pertiwi, S. Aminah, A. Tirtana, and M. Kartikasari, “Sistem Informasi Berbasis Web Untuk Pelaporan Kriminalitas Dan Monitoring Kinerja Pada Seluruh Polsek Di Wilayah Kabupaten Madiun,” *J-Intech*, vol. 10, no. 1, pp. 37–46, 2022, doi: 10.32664/j-intech.v10i1.676.
 - [9] S. Ardiansyah, M. Tri Kurnia, D. Febri, D. Herdiani, and S. Artikel, “Perancangan Sistem Informasi Pelaporan Kinerja Guru Berbasis Web Pada SMA Negeri 1 Ulujami Pemalang Informasi Artikel A B S T R A K,” *Intellect : Indonesian Journal of Innovation Learning and Technology*, vol. 03, no. 2, pp. 142–152, 2024, [Online]. Available: <https://journal.makwafoundation.org/index.php/intellect/article/view/851>
 - [10] A. Saputra, N. Ikhsan, and N. Arwandy, “Sistem Informasi Monitoring Kinerja Kepala Sekolah dan Guru Pada Koordinator Wilayah Kecamatan Muara Kuang Berbasis Web,” *Maret 2022 IJCCS*, vol. 12, no. 01, pp. 1–5, 2022, [Online]. Available: <https://ojs.palcomtech.ac.id/index.php/teknomatika/article/view/570>
 - [11] L. S. Abiningtyas, Y. R. Beeh, U. Kristen, and S. Wacana, “Sistem Informasi Pelaporan Kinerja Guru SMP Pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Semarang,” vol. 5, pp. 2183–2196, 2025.
 - [12] A. Yaqien and V. Arinal, “Implementasi Sistem Informasi Pengukuran Kinerja Karyawan di PT Hetra Vexa Group dengan Pendekatan Key Performance Indikator,” vol. 7, no. 1, pp. 32–46, 2026.
 - [13] D. Irawan, E. Yudi Darmawan, E. Elmansius Zebua, and W. Haryono, “Perancangan Sistem Informasi Proyek Berbasis Web Untuk Meningkatkan Kinerja Antar Divisi,” *Jurnal Komputer Antartika*, vol. 2, no. 4, pp. 136–146, 2024, doi: 10.70052/jka.v2i4.629.
 - [14] R. Irawan, “Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Laporan Kinerja Harian Dosen Dengan Pendekatan Object-Oriented Dan Agile Unified Process (AUP),” *JATISI (Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi)*, vol. 10, no. 2, pp. 302–315, 2023.
 - [15] D. K. Fasya, “Perancangan Sistem Monitoring Kinerja Dosen Berdasarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi Pada Fakultas Rekayasa Industri Menggunakan Metode Rapid Application Development (RAD),” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, vol. 4, pp. 350–361, 2024.
 - [16] F. Sinlae, I. Maulana, F. Setiyansyah, and M. Ihsan, “Pengenalan Pemrograman Web: Pembuatan Aplikasi Web Sederhana Dengan PHP dan MYSQL,” 2024, doi: 10.38035/jsmd.v2i2.
 - [17] R. Setiawan, D. Kurniadi, and Y. Supriatna, “Perancangan Sistem Informasi Monitoring dan Pelaporan Kinerja Aparatur Sipil Negara Berbasis Web dan Android,” *Jurnal Algoritma*, vol. 20, no. 1, pp. 156–167, 2023, doi: 10.33364/algoritma/v.20-1.1281.
 - [18] M. S. Maulana, K. Handayani, T. Firmansyah, S. Rohmah, and D. Khairulrijal, “Sistem Pelaporan dan Penilaian Kinerja Kecamatan Menggunakan Metode User Centered Design Pada Kabupaten Kuburaya,” vol. 6, no. 2, pp. 6–10, 2025.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.